

**Pandangan Pemilih Muda tentang Literasi Politik dan Partisipasi Politik
pada Pemilu 2024 di Kota Bandar Lampung**

(Skripsi)

Oleh

Reza Tri Anggara

NPM 2456041040



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
I. PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
II. TINJUAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. LANDASAN TEORI	20
C. Kerangka Berpikir	23
III. Metode Penelitian.....	29
A. Tipe Penelitian	29
B. Fokus Penelitian	29
C. Lokasi Penelitian	30
D. Jenis dan Sumber Data Penelitian	31
E. Teknik Pengumpulan Data.....	32
F. Teknik Analisis Data	33
G. Teknik Keabsahan Data	33
DAFTAR PUSTAKA.....	35

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum (pemilu) adalah salah satu bagian penting dari demokrasi, yang memberi kesempatan kepada rakyat untuk menentukan arah kebijakan serta pemimpin negara. Sebagai bentuk dari kedaulatan rakyat, pemilu bukan hanya menjadi alat dalam dunia politik, tetapi juga menjadi cara bagi warga negara belajar untuk terlibat secara aktif dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Sesuai dengan itu, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU) melalui *Pedoman Pendidikan Pemilih* (2015) menegaskan bahwa pemilu memiliki peran penting sebagai sarana untuk mengajarkan politik kepada warga negara, khususnya generasi muda yang baru pertama kali terlibat dalam proses demokrasi. KPU menyatakan bahwa kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh proses pemilu yang bebas dan adil, tetapi juga oleh seberapa tinggi warga negara memahami, menyadari, dan menggunakan hak politik mereka secara rasional dan tanggung jawab.

Dalam konteks Indonesia setelah reformasi, proses konsolidasi demokrasi telah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Heryanto (n.d.) dalam bukunya *Dinamika Konsolidasi Demokrasi Indonesia Pascareformasi* menjelaskan bahwa era reformasi membuka ruang baru bagi kebebasan politik, partisipasi masyarakat, serta transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun demikian, demokrasi Indonesia masih menghadapi tantangan utama berupa kualitas partisipasi politik yang rendah, tingkat literasi politik yang rendah, serta pengaruh politik transaksional dan sikap pragmatis dari pemilih. Heryanto menekankan bahwa tanpa dasar literasi politik yang kuat, peningkatan partisipasi politik secara jumlah tidak akan memastikan kualitas demokrasi yang mendasar.

Selain itu, dalam *Dokumen Terkait Literasi Politik dan Pelaksanaan Demokrasi*, Heryanto (n.d.) menegaskan bahwa literasi politik memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran politik warga negara. Literasi

politik tidak hanya mencakup pemahaman tentang lembaga dan proses pemilu, tetapi juga mencakup kemampuan untuk menilai informasi politik secara kritis, memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta memiliki sikap rasional terhadap perbedaan pilihan politik. Dalam konteks ini, literasi politik menjadi dasar utama bagi pemilih dalam membuat keputusan berdasarkan kesadaran, bukan semata-mata ikut-ikutan tren atau pengaruh sosial.

Surbakti (n.d.) dalam bukunya *Pengantar Ilmu Politik* yang diterbitkan oleh KPU RI menegaskan bahwa partisipasi politik merupakan bentuk nyata dari keterlibatan warga negara dalam proses pemerintahan penting, tetapi partisipasi yang bermakna hanya bisa tercapai jika masyarakat memiliki pemahaman politik yang baik. Surbakti mengatakan bahwa literasi politik membantu warga negara untuk terlibat secara aktif dan kritis, bukan hanya menjadi objek yang dipengaruhi oleh elite atau media. Oleh karena itu, pendidikan politik menjadi alat penting untuk meningkatkan kesadaran politik rakyat, terutama generasi muda yang baru memperoleh hak memilih.

Generasi muda, khususnya milenial dan generasi Z, semakin berperan besar dalam pemilu Indonesia. Analisis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut (n.d.) dalam laporan *Pemilih Muda sebagai Penentu Arah Politik: Analisis Pemilu 2024* menyebutkan bahwa jumlah pemilih muda pada Pemilu 2024 melebihi separuh pemilih nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pola dan hasil pemilu sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dan literasi politik generasi muda. Namun, ini juga menghadirkan tantangan besar karena masih banyak pemilih muda yang kurang memahami politik, mudah terpengaruh berita di internet, dan kurang kritis dalam menilai isu politik.

Sutisna (n.d.) dalam *Strategi Peningkatan Literasi Politik Pemilih Pemula* menjelaskan bahwa rendahnya literasi politik di kalangan pemilih muda disebabkan karena kurangnya pendidikan politik formal dan nonformal yang sesuai dengan situasi sosial mereka. Sutisna menekankan bahwa

strategi peningkatan literasi politik harus disesuaikan dengan karakteristik generasi muda yang hidup di era digital dan bergantung pada media sosial untuk mendapatkan informasi. Dengan pendekatan yang partisipatif dan edukatif, diharapkan generasi muda bisa menjadi pemilih yang memiliki pemikiran rasional, kritis, dan peduli pada kepentingan bangsa.

Hal yang sama juga disampaikan Fatmarina (2019) dalam artikelnya *Literasi Internet dan Partisipasi Politik Pemilih Pemula*. Dia menjelaskan bahwa media digital memiliki peran ganda dalam proses politik. Di satu sisi, media digital menyediakan informasi politik yang cepat dan luas, tetapi di sisi lain dapat menjadi sarana penyebaran berita palsu, disinformasi, dan ujaran kebencian yang memengaruhi cara pemilih muda memandang politik. Oleh karena itu, literasi digital politik adalah bagian tak terpisahkan dari literasi politik secara umum. Fatmarina menekankan pentingnya meningkatkan kesadaran kritis pemilih pemula agar bisa memilah informasi politik yang benar dan tidak terjebak dalam narasi yang manipulatif.

Pentingnya literasi politik bagi pemilih muda juga dijelaskan oleh Farikiansyah (2024) dalam jurnal *Meningkatkan Partisipasi Pemilu Melalui Literasi Politik Pemuda Milenial dalam Pendidikan Kewarganegaraan*. Menurutnya, penyebab rendahnya partisipasi politik generasi muda sering kali karena ketidakpahaman mereka tentang pentingnya hak pilih dan dampak keputusan politik terhadap kehidupan sosial. Dengan pendidikan kewarganegaraan yang berbasis literasi politik, generasi muda bisa memahami bahwa setiap pilihan politik yang mereka ambil memiliki pengaruh terhadap arah pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, literasi politik menjadi cara untuk membentuk pemilih yang bertanggung jawab dan berintegritas.

Kaitan antara literasi politik dan konsolidasi demokrasi juga secara mendalam diulas oleh Bakti (n.d.) dalam karyanya *Konsolidasi Demokrasi dan Literasi Politik*. Bakti menjelaskan bahwa literasi politik adalah inti dari keberlangsungan demokrasi karena ia membentuk kesadaran politik

yang rasional dan mencegah masyarakat terjebak dalam politik identitas, populisme, dan politik uang. Ia juga menekankan bahwa literasi politik tidak hanya mencakup pemahaman proses pemilu, tetapi juga pembentukan etika politik dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks pemilu, meningkatnya literasi politik berarti memperkuat partisipasi masyarakat yang berkualitas, bukan sekadar meningkatkan jumlah pemilih yang datang ke TPS.

Universitas Islam Negeri Jakarta (n.d.) dalam dokumen *Strategi Literasi Politik* menjelaskan bahwa cara meningkatkan literasi politik di Indonesia harus dilakukan secara bertahap, mulai dari penguatan pendidikan formal, dilanjutkan dengan edukasi publik melalui media, serta didukung oleh kegiatan sosialisasi oleh KPU. Strategi ini menekankan kerja sama antara institusi pendidikan, organisasi masyarakat, dan media guna menciptakan masyarakat yang melek politik. Dalam konteks ini, peran KPU tidak hanya sebagai penyelenggara pemilu, tetapi juga sebagai lembaga pendidikan demokrasi yang memiliki tanggung jawab moral dalam membangun kesadaran politik masyarakat.

Tular Nalar (n.d.) dalam *Menjadi Pemilih Pemula yang Kritis* juga memperkuat pendapat tersebut dengan menegaskan bahwa pemilih pemula merupakan kelompok penting dalam sistem demokrasi karena memiliki kemungkinan besar untuk membawa perubahan dalam budaya politik Indonesia. Namun, tanpa pemahaman politik yang cukup, potensi itu bisa jadi rentan terhadap manipulasi dan informasi yang menyesatkan. Karena itu, pembentukan karakter pemilih muda harus dilakukan melalui pendekatan literasi politik yang menyeluruh, mencakup aspek pengetahuan (kognitif), sikap (afektif), dan tindakan partisipatif (psikomotorik).

Menurut jurnal *SOLMA* (n.d.), literasi politik menjadi cara utama untuk memberi pemahaman tentang hak pilih dan tanggung jawab politik kepada pemilih pemula. Jurnal ini menunjukkan bahwa banyak pemilih muda masih belum tahu akibat dari pilihan mereka dalam pemilu, dan cenderung melihat pemilu sebagai kegiatan biasa yang tidak ada pengaruh langsung

terhadap hidup mereka. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara partisipasi politik secara formal dan pemahaman politik yang dalam, yang perlu diatasi dengan pendidikan politik yang terus-menerus.

Anshori (2023) dalam jurnal *Audiens* menyatakan bahwa kurangnya literasi politik di kalangan pemilih muda bisa menyebabkan penyebaran informasi palsu meningkat dan kepercayaan terhadap lembaga demokrasi menurun. Dalam penelitiannya lanjutan di jurnal *Interaksi*, Anshori et al. (2023) menegaskan bahwa pemahaman literasi politik pemilih pemula sangat penting dalam mencegah penyebaran hoaks pada Pemilu 2024. Pemilih yang mampu berpikir kritis biasanya tidak mudah terpengaruh oleh propaganda yang membawa kesalahan. Dengan demikian, literasi politik bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi juga berfungsi sebagai perlindungan terhadap penurunan kualitas demokrasi.

Selain itu, jurnal *P4I* (n.d.) dalam artikelnya tentang partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu 2024 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu masih bervariasi dan sangat dipengaruhi oleh faktor pendidikan, ekonomi, serta tingkat literasi politik. Di wilayah perkotaan seperti Kota Bandar Lampung, partisipasi politik umumnya lebih tinggi karena akses yang lebih baik terhadap informasi dan pendidikan politik. Namun, partisipasi yang tinggi belum tentu mencerminkan kesadaran politik yang matang. Hal ini menunjukkan bahwa literasi politik tetap menjadi faktor utama dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas.

Achitia (2023) dalam penelitiannya tentang *Komunikasi Politik Dewan Pimpinan Wilayah Partai Gelora Indonesia Provinsi Lampung dalam Pemenangan Pemilu Umum 2024* menyoroti pentingnya komunikasi politik yang efektif dalam membentuk persepsi pemilih muda di Provinsi Lampung. Ia menemukan bahwa media sosial memainkan peran penting dalam membentuk citra politik dan memengaruhi perilaku pemilih, khususnya di kalangan generasi Z dan milenial. Namun, tanpa literasi

politik dan media yang kuat, pemilih muda mudah terjebak dalam politik simbolik yang bersifat emosional dan tidak memiliki arti sebenarnya.

Konteks lokal di Bandar Lampung mencerminkan dinamika politik nasional yang cukup rumit. Sebagai kota metropolitan dengan beragam budaya dan masyarakat yang heterogen, Bandar Lampung menghadapi tantangan dalam mengajak generasi muda lebih aktif dalam hal politik. Dalam bukunya *Sistem Politik Indonesia*, Akademi Perguruan Muhammadiyah Demak (n.d.) menjelaskan bahwa sistem politik Indonesia bersifat terbuka dan mendorong partisipasi, tetapi keberhasilan penerapannya bergantung pada kemampuan masyarakat memahami nilai-nilai demokrasi. Oleh karena itu, pendidikan politik di tingkat lokal sangat penting untuk menciptakan pemilih muda yang memiliki kesadarannya sendiri dan bisa berkontribusi pada pembangunan demokrasi.

Sofia (2024) dalam penelitiannya tentang *Dinamika Partisipasi Politik Generasi Milenial pada Pemilihan Presiden 2024* menunjukkan bahwa generasi milenial memiliki cara berpartisipasi yang berbeda. Mereka lebih menyukai bentuk partisipasi yang fleksibel, kreatif, dan didukung oleh media digital, ketimbang bentuk kegiatan politik yang tradisional. Karena itu, pendekatan dalam memberikan pendidikan politik kepada generasi ini harus disesuaikan dengan kebiasaan dan preferensi mereka agar bisa meningkatkan keterlibatan mereka dalam proses demokrasi secara nyata.

Aziza (2022) dalam skripsinya *Penggunaan Instagram sebagai Literasi Politik bagi Pemilih Pemula di Kabupaten Barru Tahun 2020* menyatakan bahwa media sosial seperti Instagram menjadi sarana utama bagi pemilih muda dalam mengakses informasi politik. Namun, sebagian besar dari mereka belum mampu membedakan informasi yang benar dari propaganda. Temuan ini menunjukkan bahwa literasi politik digital harus menjadi bagian penting dari strategi pendidikan politik modern.

Universitas Pendidikan Veteran Jakarta (n.d.) dalam penelitiannya *Literasi Politik KPU dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih: Studi di Kota Samarinda* menemukan bahwa upaya KPU dalam meningkatkan literasi

politik melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih memberikan dampak positif terhadap peningkatan partisipasi pemilih. Namun, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada kerja sama yang baik antara lembaga penyelenggara pemilu, institusi pendidikan, serta media massa lokal.

Dari berbagai studi dan referensi di atas, dapat disimpulkan bahwa literasi politik merupakan faktor penting dalam memperkuat peran generasi muda dalam politik di Indonesia, terutama menjelang dan saat Pemilu 2024. Tantangan yang dihadapi meliputi kesenjangan akses digital, rendahnya minat terhadap isu politik, serta kuatnya pengaruh media sosial dalam membentuk opini publik. Di sisi lain, peluang yang ada adalah semakin terbukanya ruang untuk partisipasi melalui platform digital dan meningkatnya kesadaran generasi muda tentang pentingnya berpartisipasi dalam politik.

Dalam konteks Kota Bandar Lampung, meningkatkan pemahaman politik menjadi hal yang sangat penting agar pemilih muda tidak hanya ikut berpartisipasi dalam jumlah yang banyak, tetapi juga secara berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk melihat cara pemilih muda memahami konsep pemahaman politik, bagaimana mereka terlibat dalam pemilihan 2024, serta hal-hal apa saja yang mempengaruhi tingkat kesadaran dan keterlibatan mereka.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, diharapkan penelitian ini bisa memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kegiatan politik generasi muda di masa digital dan memberikan saran-saran strategis untuk meningkatkan pendidikan politik di tingkat daerah maupun nasional.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan pemilih muda, khususnya generasi milenial dan generasi Z, terhadap literasi politik dalam konteks Pemilu 2024 di Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana tingkat partisipasi politik pemilih muda dalam Pemilu 2024 di Kota Bandar Lampung?

3. Apa saja faktor yang mempengaruhi literasi politik dan partisipasi politik pemilih muda dalam Pemilu 2024 di Kota Bandar Lampung?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan pandangan dan pemahaman pemilih muda terhadap literasi politik dalam konteks Pemilu 2024 di Kota Bandar Lampung.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis tingkat partisipasi politik pemilih muda dalam Pemilu 2024 di Kota Bandar Lampung.
3. Menemukan faktor-faktor yang memengaruhi literasi politik dan partisipasi politik pemilih muda di Kota Bandar Lampung.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian literasi politik dan partisipasi pemilih muda dalam ilmu politik serta pendidikan kewarganegaraan, khususnya dalam konteks demokrasi Indonesia yang sedang berkembang. Hasil penelitian juga dapat memperkaya pemahaman tentang hubungan antara literasi politik dan kualitas demokrasi di kalangan generasi muda.

Manfaat Praktis

1. Memberikan masukan dan bahan evaluasi kepada Komisi Pemilihan Umum, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat dalam merumuskan dan melaksanakan program pendidikan politik yang efektif dan relevan bagi pemilih muda di Kota Bandar Lampung.
2. Membantu meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi politik pemilih muda sehingga dapat memperkuat proses demokrasi yang berkualitas dan berkelanjutan di daerah tersebut.

3. Menjadi referensi bagi pengembangan strategi komunikasi politik yang adaptif dan sesuai dengan karakteristik generasi milenial dan Z dalam memberikan edukasi politik.

II. TINJUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Farikiansyah (2024) melakukan studi tentang literatur yang membahas cara meningkatkan partisipasi dalam pemilu melalui literasi politik pada generasi muda milenial. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan yang menggunakan teknologi bisa meningkatkan kesadaran politik dan membuat generasi muda lebih aktif dalam berpartisipasi. Pendekatan seperti konstruktivisme dan belajar dalam kelompok efektif dalam membentuk pemilih yang kritis dan bertanggung jawab. Penelitian ini penting sebagai dasar bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan alat penting untuk memperkuat pemahaman politik.

Fatmarina (2019) Mengevaluasi kemampuan berpikir kritis pemilih muda dalam menggunakan internet dan berpartisipasi dalam politik, dengan fokus pada peran ganda media digital. Media digital bisa memberikan informasi politik yang luas, namun juga bisa digunakan untuk menyebarkan berita palsu dan ucapan benci. Karena itu, kemampuan literasi politik digital sangat penting dalam upaya melindungi demokrasi dan meningkatkan keterlibatan politik para pemuda.

Sutisna (n.d.) Penelitiannya fokus pada strategi untuk meningkatkan pemahaman politik pemilih muda dengan cara yang disesuaikan dengan sifat generasi muda yang sangat menggunakan media sosial. Pendekatan yang mengajar dan melibatkan partisipasi bisa membantu pemilih muda menjadi lebih kritis dan terlibat dalam dunia politik.

Bakti (n.d.) Mencari tahu hubungan antara literasi politik dan kuatnya demokrasi. Peneliti menyatakan bahwa literasi politik merupakan bagian penting dari demokrasi yang baik, yang bisa mencegah pemilih muda terpengaruh oleh politik uang dan identitas. Literasi politik juga mencakup pembentukan etika dalam politik dan rasa tanggung jawab terhadap masyarakat.

Achitia (2023) dalam penelitiannya tentang komunikasi politik partai di Provinsi Lampung menekankan peran media sosial dalam membentuk pandangan politik generasi muda. Meski begitu, ia juga menyoroti pentingnya memiliki kemampuan memahami politik yang baik agar pemilih muda tidak terbawa oleh isu-isu yang hanya bersifat simbolik dan emosional.

Anshori (2023) menyatakan bahwa kemampuan memahami politik yang baik bisa mencegah penyebaran berita palsu pada Pemilu 2024, serta meningkatkan rasa percaya masyarakat terhadap proses demokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menunjukkan kaitan antara kemampuan memahami politik dengan cara menerima informasi politik secara kritis.

Universitas Pendidikan Veteran Jakarta (n.d.) menilai program literasi politik yang diadakan KPU di Kota Samarinda berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Meski demikian, program tersebut membutuhkan kerja sama yang baik antara berbagai lembaga pendidikan, penyelenggara pemilu, serta media lokal agar dapat mencapai hasil yang maksimal.

Sofia (2024) menyoroti bahwa partisipasi politik generasi milenial cenderung lebih menyukai cara yang fleksibel dan memanfaatkan media digital dibandingkan cara tradisional. Oleh karena itu, pendidikan politik harus menyesuaikan metode pengajaran agar lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan milenial.

Aziza (2022) mempelajari penggunaan Instagram sebagai alat untuk meningkatkan kemampuan memahami politik di Kabupaten Barru. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Instagram efektif dalam menyampaikan pesan politik, tetapi kurangnya kemampuan memahami teknologi digital berisiko menyebarkan informasi yang tidak akurat.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut (n.d.) menemukan bahwa pemilih muda sangat berpengaruh terhadap hasil pemilu. Namun, rendahnya

kemampuan memahami politik membuat sebagian besar pemilih muda kurang mampu mengkritik dan mudah terpengaruh oleh kampanye negatif atau berita palsu.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Metode	Temuan Utama	Relevansi
1	Fatmarina (2019)	Literasi internet dan partisipasi politik pemilih pemula	Studi literatur dan survei	Literasi politik yang diajarkan melalui pendidikan kewarganegaraan membantu memperkuat kesadaran dan ikut serta dalam urusan politik para pemuda milenial.	Pendidikan kewarganegaraan menjadi cara penting untuk meningkatkan pemahaman politik.
2	Sutisna (n.d.)	Strategi peningkatan literasi politik pemilih pemula	Studi kasus	Media digital menyajikan informasi yang cepat tapi bisa berisi berita palsu, sehingga penting bagi pemilih muda untuk memiliki literasi politik	Literasi digital harus termasuk dalam literasi politik.

				digital yang baik.	
3	Bakti (n.d.)	Konsolidasi demokrasi dan literasi politik	Studi teori dan review sumber	Cara mengajar politik yang cocok dengan generasi muda sangat efektif dalam meningkatkan partisipasi mereka dan sikap kritis terhadap isu politik.	Pendekatan pendidikan yang melibatkan partisipasi dan relevan dengan kehidupan nyata.
4	Achitia (2023)	Komunikasi politik partai Gelora Indonesia di Lampung	Kualitatif	Literasi politik merupakan bagian penting dalam memperkuat demokrasi, dan menekan masalah seperti politik uang serta identitas yang mengganggu proses demokrasi.	Literasi memainkan peran penting dalam membangun demokrasi yang berkualitas.
5	Anshori (2023)	Dampak literasi politik dan pemilu 2024	Kualitatif	Media sosial memainkan peran besar dalam	Konteks lokal dan penggunaan media sosial

		bagi pemilih pemula		membentuk cara pemuda memandang politik, oleh karena itu edukasi literasi politik sangat penting agar pemuda tidak tertipu oleh politik simbolik yang tidak jelas.	sangat berpengaruh.
6	Universitas Pendidikan Veteran Jakarta (n.d.)	Literasi politik KPU dalam peningkatan partisipasi pemilih di Samarinda	Studi lapangan	Literasi politik juga membantu mengurangi penyebaran berita palsu dan meningkatkan kepercayaan pemilu masyarakat terhadap sistem demokrasi.	Literasi adalah bentuk perlindungan terhadap demokrasi.
7	Sofia (2024)	Dinamika partisipasi politik generasi milenial	Kualitatif	Program sosialisasi dan pendidikan politik dari KPU berhasil meningkatkan jumlah pemilih	Program literasi politik perlu bersifat praktis dan aplikatif.

				secara signifikan.	
8	Aziza (2022)	Penggunaan Instagram sebagai literasi politik pemilih pemula	Studi kasus	Pemuda milenial lebih suka terlibat dalam politik secara digital dan cara yang fleksibel, sehingga metode pendidikan politik perlu disesuaikan dengan gaya mereka.	Pendidikan politik harus selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.
9	KPU Kabupaten Garut (n.d.)	Pemilih muda sebagai penentu arah politik	Analisis data	Instagram sangat efektif sebagai media untuk berpolitik, dan literasi digital sangat penting agar pemilih tidak mudah terpengaruh oleh konten negatif.	Literasi media sosial merupakan bagian dari pendidikan politik.
10	Farikiansyah (2024)	Meningkatkan partisipasi pemilu	Analisis literatur	Pemilih muda menjadi mayoritas dalam pemilu,	Ada penekanan pada penguatan literasi politik terutama pada

		melalui literasi politik pemuda milenial		tapi mereka lebih rentan terdampak informasi negatif karena masih rendah literasi politik mereka.	kalangan pemuda.
--	--	--	--	---	------------------

Secara umum, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa literasi politik berpengaruh besar terhadap partisipasi politik generasi muda. Beberapa peneliti seperti Fatmarina (2019), Bakti (n.d.), dan Farikiansyah (2024) menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan dan literasi politik adalah cara utama untuk meningkatkan kesadaran politik di kalangan pemuda milenial. Mereka semua sepakat bahwa penguasaan literasi politik penting agar generasi muda bisa terlibat secara aktif dan bertanggung jawab dalam pemilu.

Penelitian Sutisna (n.d.), Sofia (2024), dan Aziza (2022) menambahkan sudut pandang baru dengan menyoroti peran media digital dan media sosial dalam menyebarkan pendidikan politik.

Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa media digital, terutama platform seperti Instagram, bisa menjadi sarana efektif untuk meningkatkan kemampuan memahami politik. Namun, mereka juga menemukan tantangan besar seperti adanya hoaks dan rendahnya kemampuan berpikir kritis di kalangan pemilih muda. Hal ini membuktikan bahwa literasi politik digital menjadi aspek penting yang perlu dikembangkan dalam pendidikan politik generasi muda.

Sementara itu, penelitian Achitia (2023) dan Anshori (2023) fokus pada peran komunikasi politik dan kepercayaan terhadap demokrasi. Mereka menekankan bahwa kemampuan memahami informasi politik secara kritis sangat penting agar masyarakat, terutama pemuda, tidak mudah terpengaruh

oleh isu-emosional atau simbol politik. Hal ini sejalan dengan temuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut (n.d.) yang menunjukkan bahwa pemilih muda memiliki pengaruh besar dalam pemilu, tetapi tingkat literasi politik mereka masih rendah.

Di sisi lain, penelitian dari Universitas Pendidikan Veteran Jakarta (n.d.) memberikan bukti bahwa program literasi politik yang diinisiasi oleh KPU mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Meski demikian, hasilnya belum optimal karena masih memerlukan kerja sama antarlembaga dan dukungan dari media lokal. Temuan ini penting karena menunjukkan peran strategis lembaga penyelenggara pemilu dalam membentuk kesadaran politik masyarakat, terutama generasi muda.

Meskipun berbagai penelitian sebelumnya membahas literasi politik dari berbagai sudut, seperti pendidikan, media digital, dan komunikasi politik, tetapi belum banyak yang secara spesifik meneliti implementasi program literasi politik oleh KPU di daerah Lampung.

Mayoritas penelitian masih bersifat umum dan berfokus pada analisis teoritis atau studi kasus di tempat lain. Selain itu, belum ada kajian yang secara langsung menghubungkan literasi politik dengan tingkat partisipasi nyata generasi muda dalam pemilu di Lampung.

Berdasarkan ketidakseimbangan tersebut, penelitian ini memiliki posisi yang penting, yaitu untuk mengisi celah dalam penelitian sebelumnya dengan mengkaji peran pendidikan politik yang dilakukan KPU dalam meningkatkan pemahaman serta partisipasi politik anak muda di Provinsi Lampung. Harapan penulis adalah penelitian ini bisa memberikan sumbangan dalam teori mengenai pengembangan konsep literasi politik yang berbasis lembaga formal, serta memberikan manfaat nyata dalam memperkuat peran KPU sebagai pengelola pendidikan politik masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menambahkan temuan-temuan sebelumnya, tetapi juga memperluas pemahaman mengenai hubungan antara pendidikan politik, literasi politik, dan partisipasi pemilih muda di tingkat daerah.

B. LANDASAN TEORI

Dalam penelitian ini, landasan teori disusun berdasarkan tiga tingkatan teori, yaitu Grand Theory, Middle Range Theory, dan Applied Theory. Pembagian ini dimaksudkan agar pembahasan konseptual lebih sistematis, dari teori umum hingga penerapan langsung dalam konteks penelitian, yaitu literasi politik generasi muda dan peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Provinsi Lampung.

1. Grand Theory: Demokrasi dan Sistem Politik

Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menjadikan rakyat sebagai pemilik kekuasaan tertinggi. Surbakti (n.d.) mengatakan bahwa demokrasi membutuhkan keterlibatan aktif warga negara dalam proses politik, baik langsung maupun melalui wakil yang dipilih. Memahami sistem politik, lembaga pemerintahan, dan proses pengambilan kebijakan publik menjadi fondasi bagi terbentuknya warga negara yang memiliki pengetahuan tentang politik.

Menurut Heryanto (n.d.), dalam bukunya *Dinamika Konsolidasi Demokrasi Indonesia Pascareformasi*, demokrasi di Indonesia telah berkembang, tetapi masih menghadapi tantangan seperti partisipasi publik yang rendah dan tingkat literasi politik masyarakat yang belum memadai. Untuk demokrasi yang sehat, diperlukan warga negara yang mampu berpikir secara kritis, memahami hak dan kewajibannya, serta terlibat aktif dalam kegiatan politik.

Akademi Perguruan Muhammadiyah Demak (n.d.) dalam *Sistem Politik Indonesia* menegaskan bahwa sistem politik Indonesia bersifat terbuka dan menyertakan semua pihak, tetapi keberhasilannya bergantung pada seberapa baik warga negara memahami peran lembaga politik dan aktif dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi yang tinggi dalam politik tidak terlepas dari tingkat literasi politik yang kuat. Dengan demikian, dari sudut pandang teori besar, demokrasi dan sistem politik menjadi dasar utama dalam memahami peran literasi politik

sebagai syarat terbentuknya warga negara yang cerdas dan aktif dalam partisipasi politik.

2. Middle Range Theory: Literasi Politik dan Pendidikan Politik.

Pada tingkat teori menengah, literasi politik dan pendidikan politik berperan sebagai jembatan antara prinsip demokrasi dengan tindakan politik warga negara. Bakti (n.d.) menyatakan bahwa literasi politik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya memperkuat demokrasi. Literasi politik memungkinkan warga negara memahami nilai-nilai seperti keadilan, kebebasan, dan tanggung jawab sosial yang ada dalam demokrasi. Tanpa literasi politik, demokrasi bisa hanya menjadi prosedur formal yang mudah dimanipulasi oleh kelompok elit. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (2015) melalui Pedoman Pendidikan Pemilih menyatakan bahwa tujuan pendidikan politik adalah membentuk pemilih yang rasional, kritis, dan memiliki etika. Pemilih yang memiliki literasi politik tinggi tidak mudah dipengaruhi oleh isu populis atau tawaran politik uang. Pendidikan politik yang berkelanjutan juga menjadi alat penting dalam memperkuat kualitas demokrasi.

Dalam dokumen Tata Kelola Pemilu di Indonesia, KPU RI (n.d.) menyatakan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemilu tidak hanya dinilai dari aspek teknis, tetapi juga dari tingkat kesadaran politik masyarakat. Karena itu, KPU menjalankan peran strategis sebagai lembaga penyelenggara pemilu sekaligus pendidik politik masyarakat. Dengan program seperti Relawan Demokrasi, KPU Goes to Campus, dan Sekolah Demokrasi, KPU berusaha menanamkan kesadaran politik yang inklusif, terutama bagi generasi muda.

Universitas Islam Negeri Jakarta (n.d.) dalam kajian Strategi Literasi Politik menegaskan bahwa pendidikan politik yang efektif harus disesuaikan dengan karakteristik masyarakat, terutama generasi digital. Kegiatan pendidikan politik yang menggunakan media digital, diskusi interaktif, serta partisipasi komunitas terbukti mampu meningkatkan minat dan kemampuan berpikir kritis pemilih muda.

Dengan demikian, teori menengah ini menjelaskan bahwa literasi politik dan pendidikan politik merupakan dua aspek yang saling terkait dan menjadi kunci dalam membangun warga negara yang sadar akan nilai demokrasi.

3. Applied Theory: Literasi Politik Generasi Muda dan Peran KPU.

Teori terapan menjelaskan bagaimana konsep literasi politik dan pendidikan politik diterapkan dalam kehidupan nyata, terutama di kalangan generasi muda yang baru mulai memilih. Tular Nalar (n.d.) melalui modul Menjadi Pemilih Pemula yang Kritis mengatakan bahwa pemilih muda perlu memiliki kemampuan berpikir kritis agar bisa mengenali informasi palsu dan menghindari manipulasi politik. Literasi politik bagi generasi muda harus menggunakan pendekatan yang melibatkan mereka dan sesuai dengan kehidupan sosial mereka.

Penelitian Fatmarina (2019) menunjukkan bahwa media digital memiliki peran ganda dalam membentuk kesadaran politik pemuda. Di satu sisi, media digital memberi akses informasi yang luas, tetapi di sisi lain dapat menjadi sumber disinformasi. Karena itu, kemampuan literasi digital menjadi bagian penting dari literasi politik yang modern.

Aziza (2022) dalam penelitiannya tentang penggunaan Instagram sebagai media literasi politik di Kabupaten Barru menemukan bahwa media sosial bisa menjadi sarana yang efektif untuk menyampaikan pesan politik kepada pemilih muda, selama terdapat kemampuan memahami konteks politik secara kritis.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut (n.d.) juga menekankan bahwa rendahnya kemampuan memahami politik membuat pemilih muda rentan terpengaruh oleh kampanye negatif dan politik identitas.

Oleh karena itu, KPU di berbagai daerah memiliki peran penting dalam memberikan pendidikan politik yang sesuai dengan kebutuhan generasi muda.

Dalam konteks yang lebih luas, Farikiansyah (2024) menyimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan berbasis teknologi bisa meningkatkan literasi politik dan partisipasi generasi muda milenial. Hasil ini memperkuat bahwa pendekatan edukasi yang kreatif bisa menjadi cara efektif dalam meningkatkan keterlibatan politik pemuda. Dengan demikian, dalam konteks teori terapan, literasi politik bukan hanya konsep yang ada di teori, tetapi juga praktik nyata yang dijalankan oleh lembaga seperti KPU untuk membentuk generasi muda yang kritis, berpartisipasi aktif, dan memiliki pemahaman tentang demokrasi.

4. Sintesis Landasan Teori.

Berdasarkan ketiga level teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa literasi politik, pendidikan politik, dan partisipasi masyarakat merupakan konsep yang saling berkaitan dalam memperkuat sistem demokrasi.

- a. Grand theory memberikan dasar konsep mengenai pentingnya peran masyarakat dalam sistem politik yang demokratis.
- b. Middle range theory menjelaskan cara pendidikan politik dan pemahaman politik dapat meningkatkan kesadaran warga negara.
- c. Applied theory menunjukkan bagaimana konsep tersebut diterapkan di dunia nyata, seperti upaya KPU dan lembaga pendidikan dalam meningkatkan keterlibatan politik generasi muda, khususnya di Provinsi Lampung.

Dengan demikian, penelitian ini didasari pada pemahaman bahwa literasi politik merupakan alat penting dalam memperkuat demokrasi serta meningkatkan partisipasi politik generasi muda, di mana KPU berperan sebagai pelaku utama dalam proses pendidikan politik yang mencakup semua kalangan dan berkelanjutan.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dibuat untuk menjelaskan hubungan antara literasi politik, pendidikan politik, dan partisipasi politik generasi

muda, dengan menjadikan peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pendidikan politik di Indonesia sebagai fokus utama.

Secara teori, literasi politik merupakan bagian penting dalam proses pengukuhan demokrasi, karena kemampuan memahami informasi politik menjadi dasar dalam membentuk warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban mereka. Warga negara dengan literasi politik tinggi lebih mampu mengevaluasi kebijakan pemerintah, mengerti dinamika politik, serta menolak praktik politik yang tidak sehat atau manipulatif.

Dalam sistem demokrasi saat ini, pendidikan politik berperan penting dalam meningkatkan literasi politik bagi masyarakat. Menurut Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (2015), pendidikan politik tidak hanya memberikan pengetahuan tentang mekanisme pemilu, tetapi juga membentuk kesadaran moral dan etika dalam berpartisipasi dengan demokrasi. Pendekatan pendidikan politik yang berkelanjutan diharapkan dapat membantu masyarakat, terutama generasi muda, untuk berpartisipasi secara kritis dan rasional dalam setiap tahapan pemilu.

Generasi muda sebagai pemilih baru memiliki ciri khas yang berbeda dari kelompok usia lain. Mereka tumbuh di era digital, di mana media sosial menjadi sumber utama informasi politik (Aziza, 2022; Fatmarina, 2019). Kondisi tersebut membawa tantangan baru dalam bentuk literasi politik, yaitu literasi politik digital, yang menekankan kemampuan berpikir kritis dalam menilai informasi dan menolak berita palsu atau ujaran kebencian. Karena itu, pendidikan politik harus disesuaikan dengan cara belajar generasi muda yang lebih digital.

KPU memainkan peran penting dalam membentuk literasi politik generasi muda. Beberapa program KPU seperti Sekolah Pemilih Pemula, KPU Goes to School, dan Relawan Demokrasi adalah contoh nyata dari upaya pemberdayaan pendidikan politik di lapangan. Dalam kegiatan tersebut, KPU tidak hanya memberikan informasi tentang cara pemilu, tetapi juga menanamkan nilai-nilai demokrasi, tanggung jawab sosial, dan kesadaran

pentingnya partisipasi politik yang bijak. Universitas Pendidikan Veteran Jakarta (n.d.) menunjukkan bahwa program literasi politik yang dilakukan KPU secara signifikan meningkatkan partisipasi masyarakat, terutama di kalangan pemilih muda.

Meskipun demikian, tantangan utama dalam pelaksanaan literasi politik bagi generasi muda terletak pada kurangnya kemampuan berpikir kritis dan ketergantungan terhadap media sosial. Tular Nalar (n.d.) menekankan bahwa menjadi pemilih pemula yang kritis memerlukan kesadaran diri, kemampuan menilai informasi, serta pemahaman akan tanggung jawab sebagai warga negara. Oleh karena itu, pendidikan politik yang baik perlu berfokus pada pembentukan karakter kritis dan partisipatif, bukan hanya penyampaian pengetahuan.

Berdasarkan pemaparan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dapat disusun suatu kerangka berpikir bahwa literasi politik yang diperkuat melalui pendidikan politik yang dilakukan oleh KPU akan berdampak positif terhadap peningkatan partisipasi politik generasi muda di Provinsi Lampung. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat literasi politik yang dimiliki generasi muda, semakin besar pula kemungkinan mereka untuk terlibat aktif dalam proses demokrasi, baik dalam pemilu maupun dalam kegiatan politik lainnya.

Tabel 2.2 Kerangka Berpikir Penelitian

No	Konsep Utama	Aspek yang Dikaji	Hubungan Konseptual	Dampak yang Diharapkan
1	Demokrasi dan Sistem Politik	Prinsip dasar tentang bagaimana warga negara terlibat dalam sistem politik Indonesia.	Demokrasi yang baik membutuhkan warga negara yang tahu hak dan tanggung	Munculnya warga negara yang lebih aktif dalam berpartisipasi.

			jawabnya dalam politik.	
2	Literasi Politik	Mampu memahami, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi politik secara bijak dan kritis.	Kemampuan mengerti politik secara baik membuat orang lebih bijak dan beretika dalam berpolitik.	Semakin tinggi kesadaran politik dan kemampuan berpikir kritis di kalangan pemilih muda.
3	Pendidikan Politik	Menciptakan kesadaran politik dengan cara memberikan pengenalan dan pendidikan kepada masyarakat.	Pendidikan politik membantu meningkatkan pemahaman politik masyarakat, terutama anak muda.	Pemilih muda semakin memahami prinsip-prinsip demokrasi serta hak-hak politik yang mereka miliki.
4	Peran KPU	Melaksanakan kegiatan literasi dan pendidikan politik di tingkat daerah.	KPU sebagai pengelola pendidikan politik berpengaruh langsung terhadap peningkatan pemahaman politik anak muda.	Pendidikan politik menjadi lebih efektif dan masyarakat semakin percaya terhadap proses pemilu.

5	Partisipasi Politik Generasi Muda	Cara melibatkan generasi muda dalam proses demokrasi.	Dengan pemahaman politik yang baik, didukung oleh pendidikan yang diberikan KPU, partisipasi pemilih muda dalam politik bisa meningkat.	Partisipasi politik dari generasi muda meningkat, sehingga memperkuat sistem demokrasi di tingkat lokal.
---	-----------------------------------	---	---	--

Gambar Alur Kerangka Berpikir



Kerangka berpikir ini menunjukkan bahwa literasi politik adalah jembatan antara pendidikan politik dan partisipasi demokratis dari generasi muda. Di Provinsi Lampung, KPU memiliki peran penting bukan hanya dalam

mengadakan pemilu, tetapi juga dalam memberikan edukasi untuk meningkatkan kualitas pemilih. Semakin kuat literasi politik yang diberikan melalui pendidikan politik yang dijalankan KPU, semakin tinggi pula kesadaran dan keaktifan generasi muda dalam mendukung sistem demokrasi Indonesia.

III. Metode Penelitian

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial, bukan hanya menguji hipotesis seperti dalam penelitian kuantitatif. Menurut Surbakti (n.d.), pendekatan kualitatif dalam ilmu politik penting untuk memahami makna tindakan politik warga negara, persepsi mereka terhadap lembaga politik, serta nilai-nilai demokrasi yang hidup dalam masyarakat.

Dalam pendekatan kualitatif, peneliti menjadi alat utama yang secara langsung berinteraksi dengan peserta penelitian untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh terhadap realitas sosial yang diteliti. Bakti (n.d.) mengatakan bahwa penelitian kualitatif mampu menjelaskan dinamika sosial-politik dari perspektif partisipan, bukan hanya berdasarkan kerangka teori peneliti.

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, karena penelitian ini berfokus pada penggambaran secara sistematis peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan literasi politik dan partisipasi politik generasi muda di Provinsi Lampung. Menurut Heryanto (n.d.), penelitian deskriptif bertujuan untuk memaparkan realitas sosial secara mendalam dengan mempertimbangkan konteks empiris dan hubungan antar unsur dalam masyarakat.

Dengan pendekatan ini, peneliti mencoba menguraikan proses pendidikan politik yang dilakukan KPU, persepsi generasi muda terhadap kegiatan tersebut, serta dampak yang ditimbulkan terhadap partisipasi politik mereka dalam kehidupan demokratis.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada cara KPU Provinsi Lampung menjalankan peran dan tugasnya dalam meningkatkan pemahaman politik masyarakat serta mendorong para generasi muda untuk berpartisipasi dalam politik. Penelitian ini juga mencari tahu pengalaman, pendapat, dan penafsiran para pemilih muda terkait program pendidikan politik yang diadakan oleh KPU.

Secara lebih detail, fokus penelitian mencakup beberapa aspek sebagai berikut:

1. Program pendidikan politik dan literasi politik yang dilakukan oleh KPU Provinsi Lampung.

Penelitian ini akan melihat jenis, strategi, dan materi dalam kegiatan pendidikan politik yang ditujukan kepada pemilih pemula, seperti pelatihan relawan demokrasi, sosialisasi pemilu di sekolah dan kampus, serta penggunaan media sosial oleh KPU untuk menyampaikan informasi terkait politik.

2. Respons generasi muda terhadap kegiatan pendidikan politik.

Bagian ini akan mengeksplorasi cara pemilih muda memahami pesan politik yang disampaikan oleh KPU, tingkat peningkatan pemahaman politik karena kegiatan tersebut, serta hambatan yang dihadapi dalam memahami isu serta masalah politik.

3. Dampak dari kegiatan pendidikan politik terhadap partisipasi politik generasi muda.

Penelitian ini juga akan menilai perubahan sikap, kesadaran, dan tindakan politik para pemuda setelah mengikuti program pendidikan politik yang diadakan KPU.

Menurut Akademi Perguruan Muhammadiyah Demak (n.d.), sistem politik di Indonesia bersifat partisipatif dan terbuka, sehingga literasi politik memiliki peran penting untuk memastikan setiap warga negara dapat berpartisipasi secara sadar dan rasional. Dengan demikian, penelitian ini menyoroti literasi politik sebagai jembatan antara pendidikan politik dan partisipasi politik generasi muda.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Lampung, dengan fokus utama pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung. KPU adalah lembaga yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan pendidikan politik dan sosialisasi pemilu.

Lokasi penelitian dipilih karena dua alasan utama:

1. aspek strategis dan relevansi empiris.

Lampung memiliki jumlah pemilih muda yang cukup besar dan partisipasi politik yang dinamis setiap kali ada pemilu. Menurut data KPU (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2015), tingkat partisipasi kelompok muda sangat memengaruhi keberhasilan pemilu. Namun, kelompok muda ini masih sering menghadapi masalah tingkat literasi politik yang rendah.

2. ketersediaan data dan kegiatan pendidikan politik.

KPU Provinsi Lampung aktif melaksanakan berbagai program pendidikan politik, seperti KPU Goes to Campus, Sekolah Demokrasi, dan Relawan Demokrasi. Program-program ini sangat relevan dengan tujuan penelitian, yaitu mengevaluasi seberapa besar kontribusi kegiatan tersebut terhadap peningkatan kesadaran politik generasi muda.

Selain itu, Provinsi Lampung memiliki masyarakat yang sangat beragam secara sosial dan budaya. Hal ini menjadikan Lampung sebagai konteks yang cocok untuk meneliti dinamika pendidikan politik di tingkat lokal. Menurut Heryanto (n.d.), konteks lokal sangat berpengaruh terhadap proses konsolidasi demokrasi, karena interaksi politik selalu dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan nilai budaya di tempat setempat.

D. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang berupa narasi, pernyataan, dan dokumen, bukan data dalam bentuk angka. Data ini didapat dari hasil wawancara, pengamatan, serta analisis dokumen terkait pelaksanaan pendidikan politik oleh KPU.

Menurut Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (2015), dokumen kelembagaan KPU seperti pedoman pendidikan pemilih dan laporan kegiatan merupakan sumber utama untuk memahami strategi pendidikan politik yang dilakukan di tingkat nasional dan daerah.

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian:

Data Primer

Data yang didapat secara langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dengan:

1. Komisioner dan staf KPU Provinsi Lampung yang bertanggung jawab atas program sosialisasi dan pendidikan politik;
2. Pemilih muda (usia 17–25 tahun) yang sudah mengikuti kegiatan pendidikan politik KPU;
3. Akademisi atau tokoh masyarakat yang memahami pelaksanaan pendidikan politik di Lampung.

Data Sekunder

Data yang didapat dari dokumen resmi dan publikasi ilmiah, antara lain:

1. Pedoman Pendidikan Pemilih (KPU RI, 2015);
2. Tata Kelola Pemilu di Indonesia (KPU RI, n.d.);
3. Kajian akademik tentang literasi politik dari Bakti (n.d.) dan Heryanto (n.d.);
4. Hasil penelitian sebelumnya yang relevan seperti Farikiansyah (2024) dan Universitas Pendidikan Veteran Jakarta (n.d.).

Kombinasi data primer dan sekunder ini digunakan untuk memperkuat kebenaran dan kedalaman analisis melalui metode triangulasi sumber.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, metode pengumpulan data sangat penting untuk mencari informasi yang lengkap dan mendalam. Beberapa teknik yang digunakan adalah:

Wawancara Mendalam (In-depth Interview)

Wawancara dilakukan dengan pertanyaan terbuka secara semi-terstruktur, sehingga responden bisa menjelaskan pikiran dan pengalaman mereka tanpa terbatas. Menurut Heryanto (n.d.), wawancara digunakan untuk memahami makna di balik tindakan politik dan pandangan seseorang terhadap sistem demokrasi.

Observasi Nonpartisipatif

Peneliti mengamati langsung kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik yang diadakan oleh KPU, tanpa terlibat langsung di dalamnya. Tujuannya adalah mendapatkan data nyata mengenai proses, situasi, serta tanggapan peserta terhadap kegiatan tersebut (Universitas Pendidikan Veteran Jakarta, n.d.).

Dokumentasi

Dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen seperti arsip, laporan kegiatan, pedoman resmi KPU, dan materi sosialisasi. Menurut Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (2015), dokumen dari institusi merupakan bukti yang dapat memperkuat hasil interpretasi penelitian.

Tiga teknik tersebut saling melengkapi dan digunakan bersamaan dalam pendekatan triangulasi metode, agar hasil penelitian valid dan bisa mewakili realitas sosial secara utuh (Bakti, n.d.).

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan analisis interaktif yang terus berjalan sejak awal pengumpulan data sampai pada tahap membuat kesimpulan.

Menurut Heryanto (n.d.), analisis dalam penelitian kualitatif adalah proses memberi makna pada data yang diperoleh berdasarkan konteks sosial dan teori yang digunakan.

Tahapan dalam analisis tersebut mencakup:

1. reduksi data, Proses ini melibatkan pemilihan, penyederhanaan, serta pengaturan data dari wawancara, observasi, dan dokumen agar fokus pada informasi yang berkaitan dengan peran KPU dan partisipasi politik generasi muda.
2. penyajian data, Data hasil penelitian disusun dalam bentuk narasi deskriptif, kutipan dari informan, serta pola tematik yang menunjukkan hubungan antarvariabel penelitian.
3. penarikan kesimpulan dan verifikasi, Proses ini melibatkan penafsiran makna data, mencari hubungan antarunsur konseptual, serta memastikan hasil interpretasi sesuai dengan teori literasi politik dan pendidikan politik yang digunakan.

Seluruh proses analisis dilakukan secara berulang dan reflektif, sehingga hasil akhir tidak hanya menjelaskan fenomena secara deskriptif, tetapi juga memberikan makna yang terkait dengan konteks sosial dan teori yang digunakan.

G. Teknik Keabsahan Data

Data dalam penelitian ini dijamin valid melalui beberapa cara yang biasa digunakan dalam metode kualitatif, yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Membandingkan informasi dari berbagai sumber, seperti hasil wawancara dengan pihak KPU, pemilih muda, dan ahli akademik, serta memastikan sesuai dengan dokumen resmi dan hasil pengamatan di lapangan

2. Triangulasi Metode

Menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, seperti wawancara, pengamatan, dan dokumentasi, untuk memastikan hasil penelitian konsisten dan dapat dipercaya.

3. Member Check

Menurut Heryanto (n.d.), member check adalah proses meminta konfirmasi dari informan mengenai hasil analisis sementara, agar data yang diperoleh benar-benar sesuai dengan pengalaman dan realitas yang dialami informan.

4. Perpanjangan Waktu Lapangan

Peneliti menghabiskan waktu yang cukup lama di lapangan untuk membangun hubungan baik dengan informan dan memahami konteks sosial secara mendalam.

Dengan menerapkan empat cara tersebut, data dalam penelitian tetap terjaga validitasnya, sehingga hasil penelitian menjadi tepercaya, autentik, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

DAFTAR PUSTAKA

- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2015). Pedoman pendidikan pemilih [PDF].
https://www.kpu.go.id/koleksigambar/Buku_Pedoman_Pendidikan_Pemilih.pdf
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Tata kelola pemilu di Indonesia [PDF]. https://jdih.kpu.go.id/data-kabko/singkawang/data_monografi/Buku%20TKP.pdf
- Heryanto, G. G. (n.d.). Dinamika konsolidasi demokrasi Indonesia pascareformasi [PDF]. Universitas Islam Negeri Jakarta.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/58362/1/Dokumen%20137.pdf>
- Tular Nalar. (n.d.). Menjadi pemilih pemula yang kritis [Creative Commons PDF].
https://www.tularnalar.id/assets/uploaded/materi_resource_1746796049_41dbb4ef39.pdf
- Heryanto, G. G. (n.d.). Dokumen terkait literasi politik dan pelaksanaan demokrasi [PDF]. Universitas Islam Negeri Jakarta.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/58365/1/Dokumen%20141.pdf>
- Akademi Perguruan Muhammadiyah Demak. (n.d.). Sistem politik Indonesia [PDF].
<http://repo.apmd.ac.id/3107/1/19.%20Sistem%20Politik%20Indonesia%20+%20Cover.pdf>
- Surbakti, R. (n.d.). Pengantar ilmu politik [PDF]. Komisi Pemilihan Umum RI.
https://jdih.kpu.go.id/data-kabko/singkawang/data_monografi/memahami-ilmu-politik-ramlan-surbakti.pdf
- Universitas Islam Negeri Jakarta. (n.d.). Strategi literasi politik [PDF].
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/60222/1/Strategi%20Literasi%20politik.pdf>
- Bakti, A. F. (n.d.). Konsolidasi demokrasi dan literasi politik [PDF]. Universitas Islam Negeri Jakarta.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/33841/1/Buku%20Literasi%20Politik%20dan%20Konsolidasi%20Demokrasi.%20Literasi%20Politik%20Perempuan.pdf>

- Akademi Perguruan Muhammadiyah Demak. (n.d.). Buku ajar sistem politik Indonesia [PDF].
<http://repo.apmd.ac.id/3107/1/19.%20Sistem%20Politik%20Indonesia%20+%20Cover.pdf>
- Farikiansyah, I. M. (2024). Meningkatkan partisipasi pemilu melalui literasi politik pemuda milenial dalam pendidikan kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, jer.or.id.
<https://jer.or.id/index.php/jer/article/view/793>
- Jurnal SOLMA. (n.d.). Urgensi literasi politik mengenai hak pilih bagi pemilih pemula [PDF].
<https://journal.uhamka.ac.id/index.php/solma/article/download/18672/5599/66181>
- Fatmarina, N. (2019). Literasi internet dan partisipasi politik pemilih pemula. *Proceeding COMNEWS*,
<https://proceeding.umh.ac.id/index.php/COMNEWS/article/view/1080/739>
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut. (n.d.). Pemilih muda sebagai penentu arah politik, Analisis Pemilu 2024 [PDF]. https://kab-garut.kpu.go.id/public/kab-garut/dmdocument/1759114759_eb7e6dbb7fbcfafd171c.pdf
- Sutisna, A. (n.d.). Strategi peningkatan literasi politik pemilih pemula. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, JISH*.
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JISH/article/download/11771/8156/15746>
- Sofia, N. (2024). Dinamika partisipasi politik generasi milenial pada pemilihan presiden 2024. *Jurnal Sosial dan Budaya*, UIN Suska Riau.
<https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/SosialBudaya/article/download/29938/10780>
- Anshori, A. (2023). Dampak literasi politik dan pemilu 2024 bagi pemilih. *Jurnal Audiens*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
<https://journalaudiens.umy.ac.id/index.php/ja/article/download/8/8>
- Universitas Pendidikan Veteran Jakarta. (n.d.). Literasi politik komisi pemilihan umum dalam peningkatan partisipasi pemilih: Studi di Kota Samarinda [PDF].
<https://jurnal.unived.ac.id/index.php/prof/article/download/8574/5966/>

- Jurnal P4I. (n.d.). Partisipasi politik masyarakat pada pemilu 2024 [PDF].
<https://jurnalp4i.com/index.php/knowledge/article/download/4940/3664/34766>
- Anshori, A., et al. (2023). Pemahaman literasi politik pemilih pemula dalam pencegahan informasi hoax pemilu 2024. Jurnal Interaksi,
<https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/interaksi/article/view/14727>
- Aziza, A. (2022). Skripsi penggunaan Instagram sebagai literasi politik bagi pemilih pemula di Kabupaten Barru Tahun 2020 [PDF]. Universitas Hasanuddin.
https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/24049/2/E041181011_skripsi_15-06-2022%201-2.pdf
- Achitia, L. S. (2023). Komunikasi politik Dewan Pimpinan Wilayah Partai Gelora Indonesia Provinsi Lampung dalam kemenangan pemilihan umum 2024 (Undergraduate thesis). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.